Diligentia: Journal of Theology and Christian Education E-ISSN: 2686-3707
ojs.uph.edu/index.php/DIL

Peran Sosial Gereja menurut Barth dan Moltmann

Edy J. P. Gurning
Th.M. Student, Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung
gninrugyde@yahoo.com

Abstract

The ideology of the nation Indonesian is Pancasila. Within this ideology Pancasila, the state ensures religious freedom practices and provides space for religion to play a role in carrying out justice and peace in society. Particularly in the post-secular era, the role of religion become more significant. Post-secularism provides an active not passive and a greater role for religion in presenting its social role. Christianity, as one of the religions in Indonesia, is also urged to participate in playing its social roles. Based on the characteristic Indonesian context, the social role of the church initiated by Karl Barth is fir better to be employed in Indonesia than the social role of the church initiated by Jurgen Moltmann.

Keywords: *Karl Barth, Moltmann, Pancasila, Social, Trinitarian.*

Pendahuluan

Kehadiran gereja di ruang publik merupakan suatu keniscayaan. Keniscayaan ini terkait dengan panggilan gereja untuk menghadirkan masyarakat yang lebih baik. Meski sempat terpinggirkan ke wilayah privat akibat sekularisme, kini pada era postsekuler peran agama, gereja secara khusus dalam wilayah publik kian signifikan.[1] Gereja semakin dituntut peran dan sumbangsih positifnya dalam hal keadilan sosial, perdamaian, hak asasi manusia, politik, ekologi, dan masalah kemiskinan.

Meski demikian, agama sebenarnya berwajah ganda atau dalam istilah Scott Appleby, "*the ambivalence of the sacred*".[2] Agama, termasuk gereja, mempunyai potensi kekerasan sekaligus potensi perdamaian, berpotensi konstruktif dan destruktif sekaligus pada waktu yang bersamaan.

Makalah ini akan menelusuri pemikiran dua teolog modern, yaitu Karl Barth dan Jurgen Moltmann dalam melihat peran gereja di masyarakat. Mengapa harus Barth dan Moltmann? Karena keduanya dianggap sebagai dua teolog modern Protestan terbesar dan paling banyak mempengaruhi teologi Kristen di sepanjang abad ke-20.[3] Keduanya juga sama-sama menegaskan pentingnya eskatologi dalam membangun teologi sosial dan publik. Moltmann mengatakan bahwa kekristenan dalam keseluruhannya merupakan

[1] Adrianus Sunarko, "Berteologi Bagi Agama Di Zaman Post-Sekular," *Diskurus- Jurnal Fislsafat Dan Teologi Driyarkara* 15, no. 1 (2016): 25, https://doi.org/10.26551/diskursus.v15i1.17 melihat bahwa privatisasi agama di Indonesia bukan karena sekularisme tetapi karena represi agama di jaman otokrasi Suharto. Dan setelah era Suharto berakhir, bertepatan dengan masa post-sekularisme, agama segera memenuhi area publik bangsa Indonesia. .

[2] R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred : Religion, Violence, and Reconciliation* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2000).

[3] Timothy Gorringe, "Eschatology and Politicalsm," in *God Will Be in All*, ed. Richard Bauckham (Minneapolis: Fortress Press, 2001), 91.

eskatologi.[4] Karl Barth juga menilai eskatologi sebagai hal yang sangat penting dalam teologinya.[5] Terutama adalah keduanya melihat peran penting yang harus gereja ambil dalam masyarakat. Moltmann mengatakan bahwa "*The Christian Church which follows Christ's mission to the world is engaged in following Christ's service of the world. . . It is the Church of God where it is a Church for the world*".[6] Barth biasanya dilihat sebagai seorang teolog yang menekankan transendensi dan keutamaan Allah bertentangan dengan teologi liberal yang berpusat pada manusia. Barth sering dianggap abai terhadap persoalan yang ada di sekitarnya. Namun, Clifford Green menyimpulkan hal yang sebaliknya dengan mengatakan bahwa Barth "*as much concerned to develop a social and public theology as a theocentric (christocentric and trinitarian!) theology*".[7] Barth sendiri sebenarnya secara eksplisit mengatakan bahwa gereja ada untuk dunia.[8] Sejak awal sampai akhir Barth berteologi untuk umat. Hubungan teologi dan politik senantiasa mendapat perhatiannya. Barth mengembangkan suatu teologi yang berpusat pada Allah, Kristus, dan Roh Kudus dalam memikirkan masalah-masalah sosial.[9] Teologi terbuka untuk soal-soal kemasyarakatan tampak juga jelas dari aksi nyata yang ia lakukan. Barth memimpin perjuangan gereja di Jerman melawan Nazi melalui Deklarasi Barmen. Dari kegiatan sosialnya melalui kunjungan-kunjungan ke penjara dan karangan-karangannya tentang hubungan gereja dan masyarakat di Eropa, di antara Eropa Barat dan Timur (negara komunis) dan juga dalam soal perdamaian antar-negara adikuasa, serta keterlibatannya dalam penolakan terhadap pemakaian senjata nuklir.[10] Dalam pemikiran kedua tokoh ini, pengharapan akan dunia baru yang akan datang tidak memadamkan tanggung jawab sosial gereja di dunia ini. Eskatologi tidak menjadikan tanggung jawab sosial menjadi tidak relevan.

Makalah ini akan berargumen bahwa peran sosial gereja yang diajukan Barth lebih tepat diterapkan bagi gereja-gereja di Indonesia. Di tengah kemajemukan agama dan suku, dan sebagai kelompok minoritas, gereja harus tampil sebagai dirinya sendiri dengan memberitakan Injil, menyampaikan suara kenabiannya sambil hadir sebagai teladan. Di

---

[4] Jürgen. Moltmann, *Theology of Hope : On The Ground and Implications of a Christian Eschatology* (London: SCM Press, 1967), 16, mengatakan kalimat yang menjadi sangat populer: "From the first to last, and not merely in the epilogue, Christianity is eschatology, is hope, forward looking and forward moving, and therefore also revolutionizing and transforming the present. The eschatological is not one element of Christianity, but it is the medium of Christian faith as such, the key in which everything in it is set. . . . . The eschatological outlook is characteristic of all Christian proclamation, of every Christian existence and of the whole Church".

[5] Karl Barth, *The Epistle to the Romans, Terj: Edwyn Hoskyns* (London: Oxford University Press, 1963), 314, mengatakan "If Christianity be not altogether throughgoing eschatology, there remains in it no relationship whatever with Christ". Gorringe, Eschatology, 99, setelah menyelidiki seluruh karya Barth, terutama Church Dogmatics-nya, menyimpulkan: "It is true that the dogmatics is not 'wholly and completely' eschatology as the second Romans required theology to be, but eschatology is never far away either. Contrary to what is often implied, Barth's theology never became de-eschatologized".

[6] Moltmann, *Theology of Hope : On The Ground and Implications of a Christian Eschatology*, 327.

[7] Clifford. Green, *Karl Barth : Theologian of Freedom* (London: Harper & Row, 1989), 18,

[8] Karl Barth, *Church Dogmatics*, ed. G.W. Bromiley dan T. F. Torrance, vol. IV (Edinburgh: T. & T. Clark International, 1958), 796,

[9] Green, *Karl Barth : Theologian of Freedom*, 18.

[10] Green, 18.

tengah maraknya aksi kekerasan atas nama agama, maka aksi transformasi yang mengarah kepada revolusi yang ditawarkan Moltmann bukan merupakan nasihat yang bijak.

Untuk itu akan ditelusuri penafsiran keduanya atas sejarah yang menjadi titik berangkat untuk mencoba memahami pemikiran keduanya atas tiga topik turunannya, yaitu posisi dasar teologis, relasi gereja dengan negara, dan peran gereja di tengah masyarakat. Dalam menilai pemikiran yang paling tepat diterapkan di Indonesia, pemikiran kedua teolog akan ditinjau berdasarkan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk dan demokratis.

Karl Barth dan Ketuhanan Kristus

Ketuhanan Kristus adalah konsep teologi *Reformed* yang pertama kali dirumuskan oleh Johanes Calvin. Karl Barth merupakan teolog modern paling populer yang meneruskan konsep Calvin tersebut. Penerapan ketuhanan Kristus ini dalam kehidupan pelayanan Barth, dapat dilihat lebih jelas dalam peristiwa gereja Jerman terlibat aktif dalam persoalan sosial yang terkait dengan kepemimpinan Hitler. Gereja Jerman memainkan peranan sosialnya dan melahirkan sebuah deklarasi bersama dari gereja-gereja yang mengaku dikenal dengan Deklarasi Barmen. Perumusan deklarasi Barmen ini dipimpin oleh Karl Barth. Tidak mengherankan jika ketuhanan Kristus tampak dalam deklarasi tersebut, terutama dalam dua pasal pertama.[11]

Oleh karena itu, tidak ada satu area pun untuk orang percaya harus mendengarkan kuasa-kuasa atau hukum-hukum lain selain suara Kristus. Barth mengatakan bahwa "*There is no place in the world that is excepted and in which the liberating lordship of Christ is invalid…. Therefore, the liberating power of Christ penetrates, redeems, and claims the whole life, including its political and economic relationships*."[12] Ketuhanan Yesus tidak terbatas hanya dalam wilayah spiritual, iman, dan gereja tetapi meliputi semua area kehidupan manusia tanpa kecuali. Siapa pun yang mencoba membatasi ketuhanan Kristus hanya di wilayah rohani, iman, dan gereja berarti menyangkali ketuhanan Kristus atas semua aspek kehidupan. Sejarah dilihat sebagai wujud kemenangan Kristus atas setan. Barth berbeda dengan Luther, yang memandang sejarah sebagai konflik antara Allah dan Setan yang didasarkan pada konsep dua kerajaan. Bagi Barth, Yesus telah menang dan Yesus memerintah sebagai Raja (*kingly lordship*) atas seluruh aspek kehidupan. Yesus mengklaim seluruh kehidupan manusia, rohani dan politik, adalah miliknya dan manusia harus tunduk kepada pemerintah-Nya sebagai Raja.

---

[11] Tesis 1: Jesus Christ, as he is attested to us in Holy Scripture, is the one Word of God whom we have to hear, and whom we have to trust and obey in life and in death.

We reject the false doctrine that the church could and should recognize as a source of its proclamation, beyond and besides this one Word of God, yet other events, powers, historic figures, and truths as God's revelation.

Tesis 2: As Jesus Christ is God's comforting pronouncement of the forgiveness of all our sins, and with equal seriousness, he is also God's vigorous announcement of his claim upon our whole life. Through him there comes to us joyful liberation from the godless ties of this world for free, grateful service to his creatures. We reject the false doctrine that there could be areas of our life in which we would belong not to Jesus Christ but to other lords, areas in which we would not need justification and sanctification through him. Green, 149.

[12] Jürgen. Moltmann, *On Human Dignity : Political Theology and Ethics* (Philadelphia: Fortress, 1984), 82,

Posisi dasar teologis: eskatologi Kristologis

Barth mencoba menjabarkan konsep eskatologinya secara kristologis. Menurutnya, seluruh dunia telah berada dalam Kristus dan berada di bawah ketuhanan-Nya. Tidak ada lagi pertarungan yang bersifat apokaliptik antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis, sebagaimana dipahami Martin Luther. Iblis telah dikalahkan di kayu salib. Kemenangan sudah diraih Kristus melalui kebangkitan-Nya dari kematian. Kemenangan Kristus ini adalah kemenangan yang diraih-Nya bagi semua manusia, sekali untuk selamanya. Kemenangan ini masih samar-samar saat ini dan baru saat kedatangan Kristus kedua kali kemenangan Kristus ini dinyatakan dengan jelas di depan semua manusia. Inilah posisi dasar teologi Barth dalam mengembangkan peran gereja di tengah masyarakat.

Relasi gereja dan negara

Bagaimana Barth merumuskan hubungan gereja dan negara? Menurut Barth, gereja dan negara mempunyai kesatuan dalam hal dasar dan tujuan. Baik gereja maupun negara sama-sama berada di bawah ketuhanan Kristus dan keduanya ada untuk tujuan melayani karya Kristus di bumi supaya Kerajaan Allah hadir di bumi seperti di sorga. Namun, gereja dan negara juga mempunyai perbedaan. Tugas dan peran masing-masing berbeda. Gereja, yang merupakan lingkaran dalam ketuhanan Kristus, mengurusi hal rohani, iman, proklamasi Injil. Sedangkan negara yang merupakan lingkaran luar ketuhanan Kristus, mengupayakan keadilan sosial, ketertiban, kebebasan hak asasi manusia.[13] Oleh karena itu, gereja tidak boleh berdiri di atas dan menguasai negara seperti kepemimpinan Paus di abad pertengahan atas seluruh tugas gereja dan negara. Negara tidak boleh berdiri di atas dan menguasai gereja seperti yang pernah terjadi di abad ke—4 M saat Konstantinopel menjadikan Kristen sebagai agama resmi negara. Akan tetapi, gereja dan negara harus berdiri terpisah, dengan tugas masing-masing yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu Kerajaan Allah.[14] Namun. gereja harus aktif untuk mengingatkan negara tentang perwujudan keadilan. Negara tidak mampu untuk memperingati dirinya tentang tolok ukur yang benar karena hanya kepada gereja Allah menyingkapkan kebenaran nilai-nilai Kerajaan Allah. Gereja juga harus ikut memberikan dorongan kepada negara karena dengan dirinya sendiri, negara tidak berdaya untuk bergerak maju mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah. Hal ini dilakukan gereja supaya negara yang adil dapat bereksistensi sebagai perumpamaan, kiasan, dan analogi dari Kerajaan Allah yang gereja percayai dan beritakan.[15] Keadilan, ketertiban, dan kemanusiaan yang hendak diwujudkan negara itu sifatnya tidak sempurna, relatif, dan sementara[16] dibandingkan wujud Kerajaan Allah yang

---

[13] Karl Barth, "The Christian Community and the Civil Community," *Karl Barth: Theologian of Freedom*, 1989, 14, Makalah ini tidak mengikuti penomoran halaman yang terdapat dalam buku Green, tetapi mengikuti penomoran paragraf yang Barth berikan.

[14] Bagaimana hubungan gereja dan negara harus diwujudkan, bukanlah sesuatu yang gampang untuk dirumuskan. Untuk memahami sejarah hubungan gereja-negara sampai kepada konteks NKRI, baca A.A. Yewangoe, "Beberapa Catatan Mengenai Hubungan Gereja-Negara," *Hubungan Gereja Dan Negara Dan Hak Azasi Manusia*, 1996, 23–30.

[15] Barth, "The Christian Community and the Civil Community," 14.

[16] Barth, 9.

sepenuhnya sudah ada dalam Kristus, tetapi yang akan dinyatakan nantinya kelak (eskatologi kristologis).

Berdasarkan relasi ini, bagi Barth, "*there can be no indifferent, apolitical Christianity*".[17] Tanpa negara dan peran gereja untuk memperingatkan dan memberdayakan negara, tidak akan ada keadilan, ketertiban, dan damai yang gereja sendiri bisa nikmati. Jadi, gereja dan negara sama-sama hendak mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah – yang gereja percayai dan sadari, tetapi negara tidak mengetahuinya sehingga tidak memercayainya dan tidak menyadarinya – di bumi ini, untuk kebaikan semua masyarakat secara universal, tanpa kecuali. Lalu apa saja peran sosial yang bisa dimainkan oleh gereja? Bagaimana komunitas Kristen memengaruhi komunitas sipil secara politis? Peran sosial seperti apa yang sebaiknya diambil oleh gereja untuk mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah di dalam masyarakat?

Peran sosial gereja

1. *Gereja sebagai pemberita Injil.*

Gereja hadir di tengah masyarakat plural dengan memanfaatkan kesempatan khas dan senjata yang ada padanya, yaitu Injil tentang anugerah Allah yang membenarkan seluruh manusia, termasuk manusia politik. Injil ini memberitakan tentang Raja dan Kerajaan-Nya yang saat ini tersembunyi, tetapi yang suatu saat akan dinyatakan. Itu sebabnya Injil menurut Barth, *"is political from the very outset."*[18] *Barth kemudian menambahkan bahwa "if it is preached to real (Christian and non-Christian) people on the basis of a right interpretation of the Scripture it will necessarily be prophetically political".*[19] Menurut Barth, bukan hanya pengkhotbah yang berkhotbah secara politis, tetapi umat yang sadar akan tanggung jawabnya di dalam masyarakat akan menginginkan dan meminta agar pemberitaan Injil mengupas persoalan politis; ia akan memahaminya secara politis, sekalipun khotbah tersebut tidak menggunakan satu perkataan politis.[20] Alangkah patut disesalkan jika jemaat terkejut atau takut pada pemberitaan yang bernada politis, seakan-akan gereja dapat bersifat nirpolitis.

2. *Gereja sebagai suara kenabian politis.*

Negara menegakkan keadilan menurut cara manusia dan mengusahakan (secara lahiriah, relatif, dan sementara) kemerdekaan, perdamaian, dan perikemanusiaan. Gereja harus tetap tampil sebagai gereja. Ia harus tetap sebagai lingkaran dalam pemerintahan Kristus. Ia tidak boleh mengambil alih tugas utama negara untuk menegakkan keadilan sebagaimana negara tidak boleh mengambil alih tugas gereja untuk menyampaikan Injil. Gereja mengingatkan negara akan Kerajaan Allah, perintah, dan keadilan-Nya yang sejati dan kekal, dan dengan demikian mengenai tanggung jawab mereka yang memerintah maupun yang diperintah.[21] Oleh karena itu, ketuhanan Kristus meliputi segala sesuatu, bukan hanya gereja, tetapi juga negara, maka gereja yang ada di lingkaran dalam pemerintahan Allah – yang kepadanya Ia menyingkapkan tentang keadilan, kemerdekaan,

[17] Barth, 4.
[18] Barth, 31.
[19] Barth, 31.
[20] Barth, 31.
[21] Barth, 10.

perikemanusiaan yang sejati – memberitahukan hal itu kepada negara yang ada di lingkar luar, yang kepadanya Allah tidak berfirman.[22]

Karena itulah gereja perlu mengangkat suaranya berkenaan dengan situasi-situasi politik yang penting yang terjadi dalam masyarakat dan negara. Gereja mengangkat suaranya melalui majelis dan sinodenya untuk menyampaikan pertimbangan kepada pemerintah.[23] Selain melalui majelis dan sinode, pertimbangan kepada pemerintah bisa juga dilakukan melalui tulisan dalam berbagai surat kabar dan buku-buku, atau melalui media lainnya seperti televisi dan internet. Baik atas nama gereja maupun atas nama pribadi sebagai seorang Kristen.[24] Semua ini harus dilakukan dengan tulus untuk berperan bagi kebaikan masyarakat dengan berbakti kepada negara dan Injil Kristus tanpa bermaksud membela ideologi tertentu atau bahkan cita-cita khusus gereja atau orang-orang Kristen tertentu. Oleh karena alasan itulah Barth menolak akan keberadaan partai Kristen.[25]

3. *Gereja sebagai teladan dan model.*

Saat gereja menjadi teladan maka saat itulah gereja memberikan sumbangan terbesarnya kepada masyarakat dan negara.[26] Mengapa? Karena menurut Barth, "*the real church must be the model and prototype of the real state. The church must set an example so that by its very exixtence it may be a source of renewal for the state and the power by which the state preserved"*.[27] Percumalah pewartaan Injil oleh gereja jika sifat dan sikapnya, anggaran dasar dan aturannya, pimpinan dan administrasinya tidak memperlihatkan secara praktis bahwa gereja, yang adalah lingkaran dalam Kerajaan Allah, menghidupi Injil yang ia proklamasikan kepada semua orang (*universal*). Mungkinkah dunia percaya kepada Raja dan Kerajaan-Nya yang diberitakan gereja jika melalui tindakan dan sikapnya gereja sendiri tidak berniat mendasarkan kebijakannya atas Injil? Dapatkah pembaruan masyarakat dan bangsa terjadi jika diketahui masyarakat umum bahwa gereja hanya sibuk dengan dirinya sendiri, memperjuangkan agendanya, dan orang-orangnya bahkan institusinya gagal mendemonstrasikan keunggulan Injil yang selalu dikhotbahkan?[28] Gereja sejati dan yang bisa menjadi model dan teladan adalah gereja yang menjadi dirinya sendiri. Barth sadar bahwa gereja belum menjadi seperti apa seharusnya, tetapi visi kerajaan Allah menjadi simbol eskatologis yang *powerful* yang akan terus menantang gereja untuk menjadi dirinya sendiri.

Peran gereja sebagai model adalah peran yang perlu dijelaskan sedikit lebih panjang karena di antara ketiga peran konkret di atas, peran sebagai teladanlah yang paling mungkin memberikan sumbangan terbesar kepada kebaikan dan kemajuan masyarakat. Akan tetapi sekaligus paling bisa menjadi batu sandungan terbesar yang menjadikan gereja diabaikan dan dipandang remeh oleh masyarakat.

Dalam hal hukum misalnya, Barth mengatakan bahwa *"true church law is exemplary law. For all its particularity, it is a pattern for the formation and administration of human law*

---

[22] Barth, 12.

[23] Barth, 32.

[24] Barth, 32.

[25] Barth, 34 "If the church is a Christian community it will not need a Christian party. If it is a true fellowship it will perform with its words and its whole existence all the functions which the disastrous enterprise of Christian parties intended to fulfill".

[26] Barth, 33.

[27] Barth, 33.

[28] Barth, 33.

generally, and therefore of the law of other political, economic, cultural and other human societies".[29] Di dalam bentuk yang diperolehnya itu, ia memperingatkan dunia sekitarnya mengenai keadilan Kerajaan Allah yang sudah nyata di dunia ini juga dalam Yesus Kristus dan akan disempurnakan kelak. Entah gereja itu sadar atau tidak, ia hendak memperlihatkan bahwa di dunia ini sudah didirikan tata tertib yang berdasarkan pembaruan situasi manusia yang akan nyata kelak.[30] *"To those outside she can and should not only say, but also demonstrate by deed,… that things can be different, not merely in heaven but on earth, not just some day but even now…."*[31] Sebaliknya, jika ternyata hukum yang diperlihatkan itu tidak dihidupi dan gereja tidak lebih baik dari organisasi kemasyarakatan yang tidak mengakui ketuhanan Kristus maka gereja akan diremehkan.[32]

Dengan pemberitaan Injil Kerajaan Allah dan dengan gereja tampil sebagai model Kerajaan Allah, Barth hendak mengubah dunia secara tidak langsung. Proklamasi dan eksistensinya menjadi cara utamanya.

Jurgen Moltmann dan Teologi Pengharapan

Dalam *On Human Dignity*, salah satu bukunya yang banyak membicarakan tentang relasi gereja dan negara, Moltmann menegaskan kegagalan teologi politik yang dikembangkan para teolog sebelumnya. Baik itu model dua kerajaan Luther maupun ketuhanan Kristus yang dikembangkan Calvin dan Barth. Kedua model teologi politik tersebut dianggap Moltmann tidak lagi bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang ada saat ini.[33] Proses sekularisasi yang terjadi di zaman modern menjadikan solusi yang ditawarkan tidak lagi relevan. Pertanyaan metafisika tidak lagi relevan dan harus digantikan dengan pertanyaan eskatologi tentang masa depan, tentang "What may I hope for?"[34] Apa yang gereja bisa tawarkan kepada dunia sebagai pengharapan yang pasti? Menurut Moltmann, "Christian eschatology speaks of Christ and his future. Its languange is the language of promises. It understands history as the reality instituted by promise".[35] Oleh karena itulah Moltmann yakin bahwa akar bagi teologi Kristen termasuk teologi politik tentunya, adalah eskatologi, yaitu pengharapan kepada janji akan masa depan Kristus, saat Yesus menjadi Tuhan atas segala sesuatu, saat Ia datang untuk kedua kalinya, saat semua janji Allah akan *shalom* itu diwujudkan di bumi. Sejarah dibentuk oleh pengharapan akan janji masa depan Kristus sehingga kesimpulan Stanley Grenz dan Roger Olson dapat

[29] Barth, *Church Dogmatics*, IV:719.

[30] Green, *Karl Barth : Theologian of Freedom*, 38.

[31] Barth, *Church Dogmatics*, IV:721.

[32] Selain masalah moralitas individu dan keadilan struktural dalam lembaga gereja yang bisa menjadi sandungan, perpecahan di tubuh Kristus sendiri adalah batu sandungan terbesar untuk menjadikan gereja sebagai teladan dan perumpamaan Kerajaan Allah. Wolfhart Pannenberg, *Systematic Theology* (Michigan: Eerdmans, 1998), xiv-xv, melihat isu perpecahan untuk mengkritik model peran sosial gereja Barth dengan mengatakan, 'Hardly any other factor obscure the truth of the gospel of Jesus so much as the fact of Church division...

[33] Moltmann, *On Human Dignity : Political Theology and Ethics*, 98.

[34] Moltmann, 99.

[35] Moltmann, *Theology of Hope : On The Ground and Implications of a Christian Eschatology*, 224.

disetujui. Kesimpulan tersebut menyatakan bahwa bagi Moltmann *"the future is not determined by the present but itself determines the present"*.[36]

Posisi dasar teologis: Kristologi eskatologis

Keunikan dari kristologi eskatologis bukan orientasi utamanya kepada masa depan, tetapi di dalam pemahaman tentang subjeknya, tentang Kristus yang dipercayai. Kristus, yang adalah Mesias, atau Pembebas yang dinantikan, yang dalam tradisi iman Kristen adalah Yesus dari Nazaret.[37] Namun, untuk mengerti Yesus sebagai Kristus atau Mesias yang sejati, harus dimengerti secara eskatologis. Untuk memahaminya secara eskatologis, kisah Yesus harus dipahami dalam kerangka Perjanjian Lama. Moltmann mengatakan bahwa *"Jesus is understood historically only if his story is read in light of the remembered hope of the Old Testament and the awakened hope of the kingdom of God"*.[38] Fakta bahwa Yesus adalah seorang Yahudi dan bahwa Allah yang membangkitkan Dia dari kematian adalah Allah Israel, menjadikan Perjanjian Lama sebagai suatu presuposisi yang mutlak diperlukan bagi Kristologi.[39]

Selain dalam kerangka Perjanjian Lama, Kristus terutama harus dipahami berdasarkan peristiwa kebangkitan-Nya. Allah telah membangkitkan Kristus dari kematian. Ini berarti *"the universal resurrection of the dead has already begun in this one. The end time has already broken in. The future of the new creation has already begun"*.[40] Siapa Yesus yang dibangkitkan oleh Allah itu? Dalam kerangka kebangkitan-Nya, Yesus yang dibangkitkan Allah adalah *"the condemned blasphemer, the crucified rebel, the abandoned Son of God. The future of God and of salvation – the kingdom of God and God's kingdom of freedom – is therefore recognized and realized nowhere other than in the poor and violated Jesus, crucified for us"*.[41] Hal ini berarti bahwa melalui penderitaan-Nya, Yesus membebaskan mereka yang menderita; melalui kelemahan-Nya, Yesus memberikan kuasa yang tertindas; melalui pengalaman ditinggalkan Allah, Yesus membawa Allah kepada mereka yang ditinggalkan; melalui kematian-Nya, Ia memberikan kesalamatan kepada mereka yang dihukum mati.[42] Oleh karena itu, ketuhanan Kristus, menurut Moltmann, "*is no royal, 'kingly' lordship, but the lordship of the obedient servant of God*".[43] Ia memerintah dengan cara melayani. Ia menebus melalui penderitaan. Ia

---

[36] Stanley Grenz and Roger Olson, *20th Century Theology : God and the World in a Transitional Age* (Illinois: IVP, 1992), 176, Grenz & Olson selanjutnya berkata, "The future is ontologically prior to the present and the past. It is not becoming from the present, but coming to it, drawing it forward into totally new forms of reality."

[37] Moltmann, *On Human Dignity : Political Theology and Ethics*, 100–101 perlu menegaskan hal ini karena dalam sejarah selalu muncul tokoh atau ideologi yang dianggap sebagai mesias atau kristus yang diharapkan akan membebaskan dan membawa kepada keadaan yang lebih baik. Beberapa contoh kristus politik atau mesias politik jaman modern adalah Mussolini di Italia, Hitler di Jerman, mesin yang dipandang St. Simon membebaskan manusia dari kerja dan kesusahan, bahkan ideologi seperti Marxism dianggap sebagai mesias. Di Indonesia sendiri pengharapan akan datangnya mesias disebut sebagai ratu adil.

[38] Moltmann, 101.

[39] Moltmann, *Theology of Hope : On The Ground and Implications of a Christian Eschatology*, 41.

[40] Moltmann, *On Human Dignity : Political Theology and Ethics*, 103.

[41] Moltmann, 103.

[42] Moltmann, 103.

[43] Moltmann, *On Human Dignity : Political Theology and Ethics*, 104.

membebaskan dunia dari kematian melalui kematian-Nya sendiri. Kesatuan antara peristiwa kematian dan kebangkitan tidak bisa ditangkap oleh konsep dua kerajaan maupun konsep ketuhanan Kristus, tetapi hanya melalui Kristologi eskatologis, yaitu Kristologi *"from ahead"*[44].

Relasi gereja dan negara

Gereja dilihat sebagai partner yang setara dengan negara.[45] Gereja dan negara adalah dua lembaga yang bersama-sama memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Moltmann memakai kritik agama Marx untuk menguji efektifitas peran sosial gereja. Kritik agama Marx dipakai Moltmann bukan untuk menguji isi doktrin gereja, tetapi sebagai kritik yang bersifat fungsional. Sebagaimana ditegaskan oleh Moltmann, *"It is no longer asked whether a theological doctrine is true or false; instead, the doctrine is tested practically to see whether its effects are oppressive or liberating, alienating or humanizing"*.[46] Dengan metode ini, praxis menjadi kriteria kebenaran. Gereja yang memainkan model tersebut tidak lagi berurusan dengan relasi gereja dan negara secara abstrak, seolah-olah gereja dan negara adalah dua hal yang terpisah yang harus disatukan, tetapi gereja harus mulai dengan kesadaran akan keberadaannya secara politis dan kesadaran akan fungsi sosialnya secara aktual.[47] Relasi gereja dan negara tidak dilihat sebagaimana model Barth yang dirumuskan sebagai "ada pemisahan tetapi tidak ada keterpisahan"[48] tetapi sebagai dua lembaga yang setara dan berjuang mewujudkan Kerajaan Allah di bumi ini.

Peran sosial gereja

1. *Gereja sebagai proklamator Injil.*

Melalui pekabaran Injil, gereja melakukan misi utamanya supaya "*no corner of this world should remain without God's promise of new creation through the power of the resurrection*".[49] Pekabaran Injil harus mengobarkan pengharapan umat manusia dan menujukan pengharapan itu kepada Kristus yang bangkit, Kristus yang menawarkan keselamatan. Keselamatan yang ditawarkan Yesus harus dipahami sebagai *shalom* sebagaimana dalam Perjanjian Lama. *Shalom* tidak hanya bicara tentang keselamatan rohani dan individu, tetapi menyangkut juga pengharapan eskatologis akan keselamatan sosial, ekonomi, budaya, politik, juga alam. Sejarah kekristenan yang memahami keselamatan hanya secara vertikal dan individu, menurut Moltmann terjadi karena kekristenan mengabaikan aspek eskatologi.[50]

---

[44] Moltmann, 104.

[45] Moltmann, *On Human Dignity : Political Theology and Ethics*, 97.

[46] Moltmann, 98.

[47] Moltmann, 98–99.

[48] Eka Darmaputera, "Aspek-Aspek Etis-Teologis Hubungan Gereja-Negara Dan Implikasinya Dalam Negara Pancasila," *Hubungan Gereja Dan Negara Dan Hak Asasi Manusia*, 1996, 20.

[49] Moltmann, *Theology of Hope : On The Ground and Implications of a Christian Eschatology*, 328.

[50] Moltmann, 329.

2. *Gereja sebagai transformator.*

Dunia ini bukan *"waiting room for the kingdom of God"*.[51] Gereja tidak bisa hanya menunggu datangnya Kerajaan Allah di bumi. Meskipun dunia ini belum menjadi Kerajaan Allah, tetapi dunia ini merupakan *"the battleground and the construction site for the kingdom"*.[52] Melampaui Barth yang melihat bahwa dunia sebagai perumpamaan, analogi, dan penanda Kerajaan Allah, Moltmann mengantisipasi saat dunia menjadi Kerajaan Allah. Hal ini terjadi karena konsep dasar Kristologi eskatologis yang Moltmann kembangkan memahami sejarah sebagai *"the history of God's future"*,[53] yaitu "Allah menjadi semua di dalam semua".[54] Meski masih terselubung dan bukan kehadiran muka dengan muka, tetapi kehadiran Allah di dalam sejarah bersifat nyata. Berbeda dengan Barth yang memahami kehadiran Allah melalui firman dan sakramen, Moltmann menambahkan bahwa Allah menjumpai manusia *"in the concrete form of their liberation from hunger, oppression, alienation, enmity, and despair"*.[55] Hal ini mendorong umat Tuhan untuk mengambil tindakan konkret untuk berpartisipasi bersama Allah dan melibatkan diri sepenuhnya dalam sebuah proses pembebasan menyeluruh yang dilakukan Allah atas dunia ini sambil menemukan perannya sesuai dengan panggilan dan karunia masing-masing. Saat itulah gereja tampil menjadi agen transformasi dunia dan menjadi *"co-operators for the kingdom of God"*[56] bersama dengan negara.

Moltmann sendiri tidak mengharamkan tindakan kekerasan demi tujuan menjadikan masyarakat berangsur-angsur menjadi kerajaan Allah. Bagi Moltmann, tujuan menghalalkan cara. Itu makanya Moltmann berani mengatakan bahwa *"The problem of violence and non-violence is an illusory problem. There is only the question of the justified and unjustified use of force and the question of whether the means are proportionate to the ends"*.[57]

Peran Sosial Barth dan Moltmann Ditinjau di dalam Konteks Indonesia

Konteks sosial gereja adalah negara, karena di dalam negaralah gereja hidup dan berkarya supaya gereja mempunyai peran sosial dengan baik. Oleh karena itu, gereja perlu memahami konteks sosialnya (negara), dalam hal ini konteks sosial negara Indonesia. Adrianus Sunarko[58] memberikan tiga realitas yang menjadi konteks yang harus diperhitungkan untuk menggumulkan model peran sosial gereja yang paling tepat

---

[51] Moltmann, *On Human Dignity : Political Theology and Ethics*, 109.

[52] Moltmann, 109.

[53] Moltmann, 108.

[54] Teks eskatologis yang paling sering dikutip Moltmann dalam seluruh karya tulisnya. Frasa ini, yang berasal dari teks 1 Kor. 15:28, meringkaskan visinya tentang pengharapan akan ciptaan baru di mana Allah sendiri akan berdiam.

[55] Moltmann, *On Human Dignity : Political Theology and Ethics*, 111 Segala bentuk kehadiran Allah ini pada saat yang sama menunjuk kepada kehadiran yang lebih besar lagi, dan yang bersifat final, yaitu saat di mana "Allah menjadi semua di dalam semua".

[56] Moltmann, 111.

[57] Jürgen Moltmann, *Religion, Revolution, and the Future* (New York: Scribners, 1969), 143,

[58] Adrianus Sunarko adalah teolog Katolik yang sebelum diangkat menjadi Uskup Pangkal Pinang di tahun 2017, ia mengajar di program studi ilmu teologi di STF Driyarkara sejak tahun 2002. Sunarko banyak menulis dan memberikan pemikiran berkaitan dengan peran sosial gereja-gereja di Indonesia.

diterapkan di negara Pancasila ini.[59] Pertama, kehadiran agama yang hanya membatasi diri pada wilayah rohani yang bersifat privat. Kedua, kekerasan yang sering dikaitkan dengan agama. Ketiga, masyarakat demokratis yang majemuk. Ketiga, realitas ini akan dijabarkan secara singkat dan dipakai untuk mengevaluasi kedua model peran sosial Barth[60] dan Moltmann.[61]

1. Kecenderungan privatisasi agama

Kehadiran agama sering kali disertai dengan kecenderungan kuat untuk melihat relevansi agama hanya pada lingkup kehidupan rohani yang bersifat individual dan mengabaikan implikasi sosial, ekonomi, budaya, ekologi, dan politik sebagai bagian dari kehidupan beriman.[62] Hal itu yang dilihat oleh Sunarko tetap terjadi dalam kehidupan beragama di Indonesia akibat represi agama di zaman otokrasi Suharto.[63] Akibatnya di zaman postsekuler ini, di tengah maraknya agama dan ruang yang besar yang diberi untuk agama mengambil peranan, tetap saja kecenderungan kaum beragama, terutama akar rumput, untuk melihat agama sekedar masalah rohani pribadi. Kecenderungan ini harus dilawan. Barth dan Moltmann telah mengembangkan teologi yang memperjuangkan peran positif gereja di tengah masyarakat. Barth mengembangkan suatu teologi yang berpusat pada Allah, Kristus, dan Roh Kudus dalam memikirkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. [64]Teologi Kristen yang dibangun Moltmann bukanlah teologi yang apolitik,[65] namun teologi yang mencoba membebaskan manusia dari kemiskinan, ketertindasan, pengasingan, dan eksploitasi alam. Berdasarkan realitas pertama ini, kita belum bisa menentukan mana dari kedua model ini yang tepat diterapkan di Indonesia karena keduanya jelas tidak membawa teologi Kristen ke dalam wilayah privat semata.

2. Keterkaitan agama dengan aksi-aksi kekerasan

Tidak dapat dipungkiri bahwa maraknya kehidupan beragama di Indonesia disertai pula dengan gejala memprihatinkan berkaitan dengan kekerasan.[66] Maraknya aksi teroris

---

[59] Sunarko, "Berteologi Bagi Agama Di Zaman Post-Sekular," 23–44 Tiga realita dan konteks Indonesia yang dijabarkan Sunarko dalam artikelnya tersebut dibangun berdasarkan kerangka pemikiran Jurgen Habermas.

[60] Di Indonesia sendiri, peran sosial gereja model Barth diikuti oleh beberapa teolog awam seperti O. Notohamidjojo, T. B. Simatupang, dan beberapa teolog profesional seperti P. D. Latuihamallo, S. A. E. Nababan, dan Eka Darmaputera. Model teologi sosial kelompok ini dinamai sebagai teologi sosial modernisme. Julianus Mojau, *Meniadakan Atau Merangkul?: Pergulatan Teologis Protestan Dengan Islam Politik Di Indonesia* (Jakarta: BPK GM, 2012), chap. 3.

[61] Di Indonesia, peran sosial gereja model Moltmann diikuti oleh J. L. Ch. Abineno, J. Widyatmadja, F. Ukur, A. A. Yewangoe, dan Marianne Katoppo. Model teologi sosial kelompok ini dinamai sebagai model sosial teologi liberatif. Lih. Mojau, *Meniadakan atau Merangkul?*, bab 3. Ada lagi model ketiga, yang dinamai Mojau dengan teologi sosial pluralis. Para teolognya diantaranya Victor Tanja, Th. Sumartana, E. G. Singgih, Zakaria Ngelow, dan Iones Rakhmat.

[62] Sunarko, "Berteologi Bagi Agama Di Zaman Post-Sekular," chap. 23.

[63] Sunarko, chap. 23.

[64] Green, *Karl Barth : Theologian of Freedom*, 18.

[65] Moltmann, *On Human Dignity : Political Theology and Ethics*, 99.

[66] Sunarko, "Berteologi Bagi Agama Di Zaman Post-Sekular," 31.

dan kekerasan kepada orang lain atas nama agama. Bahkan kekerasan yang muncul akibat konflik antar agama menjadi realitas yang sulit untuk diingkari. Model teologi politik apapun yang berpotensi menimbulkan kekerasan bahkan kerusuhan sekalipun tidak dapat diterima. Barth menegaskan bahwa saat gereja menjadi dirinya sendiri, saat itulah gereja bisa hadir sebagai teladan. Moltmann cenderung menuntut aksi yang bersifat revolusioner yang menuntut perubahan radikal dari struktur yang ada di masyarakat. [67]Untuk itu, Moltmann bahkan berani menghalalkan kekerasan untuk memperbaiki dunia ini.[68] Peran sosial gereja seperti yang diajukan Moltmann cenderung berpotensi mengancam ketenteraman hidup bersama di Indonesia. Peran sosial gereja Moltmann cenderung menampilkan kekeristenan berwajah ganda, sebagaimana dituduhkan oleh Appleby. Bagaimana mungkin menghadirkan Kerajaan Allah yang penuh damai tetapi dilakukan dengan cara yang tidak damai? Selain itu, tindakan revolusioner menjadi penghalang bagi penyebaran Injil Kerajaan Allah.[69]

3. Bangsa yang demokratis dan majemuk

Dalam negara demokratis, kekuasaan politik harus bersikap netral terhadap berbagai pandangan hidup dan agama yang ada. Bagi agama Kristen, yang mempunyai klaim-klaim absolut, tentu hal ini tidak mudah.[70] Sunarko mengatakan bahwa "Kaum beragama perlu mengembangkan pola rasionalitas beriman tertentu yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara tepat dalam ruang publik masyarakat plural dan demokratis".[71] Hal yang disarankan Barth lebih tepat karena mendorong gereja dan pelaku-pelaku politik untuk menyampaikan argumen rasionalnya berupa usulan kepada pemerintah atau melalui tulisan-tulisan dan diskusi-diskusi, dalam bahasa yang dimengerti oleh semua agama yang berbeda pandangan religiusnya, tetapi tanpa mengorbankan klaim kebenaran absolut agama sendiri. Berbeda dengan Moltmann yang lebih menekankan praksis daripada mengembangkan argumen rasional yang dimengerti secara universal.[72]

Kesimpulan

Barth dan Moltmann percaya bahwa dunia membutuhkan pengharapan dan pengharapan itu adalah kerajaan Allah, yang dipahami tidak hanya dalam aspek rohani dan individu, tetapi menyangkut juga aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ekologi. Namun, keduanya berbeda dalam memahami relasi agama dan negara serta berbeda dalam

[67] Moltmann, *Religion, Revolution, and the Future*, 131.

[68] Moltmann, 143.

[69] Untuk argumen biblis tentang relasi misi dan kenidupan Kristen, baca Philip Towner, *The Goal of Our Instruction: The Structure of Theology and Ethic in the Patoral Epistles* (Bloosmsbury Academic, 2015), chap. 4.3 Dalam buku ini Towner dengan sangat jelas menyoroti motivasi misi rasul Paulus dalam aturan rumah tangga (haustafel) yang ia sesuaikan dengan aturan sosial yang dipakai oleh orang-orang Romawi-Yunani saat itu, supaya gereja terhormat di mata dunia sehingga Injil dimuliakan. Paulus sangat tidak ingin dunia melihat gereja sebagai kelompok revolusioner, yang jelas-jelas akan membuat gereja tidak dihormati dan firman Allah akan dihujat sehingga pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang membawa shalom itu akan terhalang.

[70] Sunarko, "Berteologi Bagi Agama Di Zaman Post-Sekular," chap. 35.

[71] Sunarko, chap. 36.

[72] Moltmann, *On Human Dignity : Political Theology and Ethics*, chap. 107.

praktik perwujudannya. Berdasarkan konteks Indonesia sebagai bangsa modern, demokratis, dan plural, pandangan Barth yang melihat gereja sebagai teladan lebih tepat diterapkan di Indonesia. Sedangkan pandangan transformatif Moltmann berpotensi menimbulkan kekerasan atas nama agama, sesuatu yang traumatik bagi bangsa Indonesia. Moltmann juga cenderung memaksakan perwujudan agenda keadilan sosialnya tanpa melalui pendekatan-pendekatan dan dialog-dialog dengan pemerintah dan kelompok agama yang berbeda.

Di zaman postsekuler yang memberi ruang lebih besar bagi agama untuk terlibat lebih banyak dalam memperjuangkan keadilan, pembebasan, martabat manusia, dan hak asasi manusia, sepertinya model yang dianjurkan Moltmann lebih cocok. Namun, konteks Indonesia ditentukan bukan hanya spirit zaman postsekuler, tetapi adanya tiga realitas utama yang justru lebih mendesak untuk diperhatikan.

Model Barth cenderung menjadikan peran gereja tampak terlihat agak pasif dibandingkan model Moltmann yang aktif dan cenderung revolusioner. Model Barth menjadikan gereja berperan secara tidak langsung, sedangkan model Moltmann hendak menjadikan gereja berperan secara langsung sebagai agen transformasi. Model teologi politik Moltmann mungkin sekali cocok diterapkan di negara di mana Kristen bukan minoritas dan negara melakukan berbagai represi dalam kehidupan masyarakat. Namun di negara Indonesia yang traumatik dengan kekerasan, ingin hidup tenteram dan menjunjung tinggi musyawarah untuk mencari solusi dan tindakan terbaik bagi bangsa maka peran gereja yang dipikirkan Barth, meski cenderung tampak pasif dan tidak langsung tampak efeknya, lebih cocok diterapkan di Indonesia. Jika gereja setia menjadi dirinya sendiri, bangsa Indonesia akan semakin menjadi semacam perumpamaan, tanda, dan analogi dari Kerajaan Allah. Itulah pengharapan kita semua sebagai warga negara Indonesia.

REFERENSI

Appleby, R. Scott. *The Ambivalence of the Sacred : Religion, Violence, and Reconciliation*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2000.

Barth, Karl. *Church Dogmatics*. Edited by G.W. Bromiley dan T. F. Torrance. Vol. IV. Edinburgh: T. & T. Clark International, 1958. 2/oclc/754717254&referer=brief_results.

———. "The Christian Community and the Civil Community." *Karl Barth: Theologian of Freedom*, 1989.

———. *The Epistle to the Romans, Terj: Edwyn Hoskyns*. London: Oxford University Press, 1963.

Darmaputera, Eka. "Aspek-Aspek Etis-Teologis Hubungan Gereja-Negara Dan Implikasinya Dalam Negara Pancasila." *Hubungan Gereja Dan Negara Dan Hak Asasi Manusia*, 1996.

Gorringe, Timothy. "Eschatology and Politicalsm." In *God Will Be in All*, edited by Richard Bauckham. Minneapolis: Fortress Press, 2001.

Green, Clifford. *Karl Barth : Theologian of Freedom*. London: Harper & Row, 1989.

Grenz, Stanley, and Roger Olson. *20th Century Theology : God and the World in a Transitional Age*. Illinois: IVP, 1992.

Mojau, Julianus. *Meniadakan Atau Merangkul?: Pergulatan Teologis Protestan Dengan Islam Politik Di Indonesia*. Jakarta: BPK GM, 2012..

Moltmann, Jürgen. *On Human Dignity : Political Theology and Ethics*. Philadelphia: Fortress, 1984.

———. *Theology of Hope : On The Ground and Implications of a Christian Eschatology*. London: SCM Press, 1967.

Moltmann, Jürgen. *Religion, Revolution, and the Future*. New York: Scribners, 1969.

Pannenberg, Wolfhart. *Systematic Theology*. Michigan: Eerdmans, 1998.

Sunarko, Adrianus. "Berteologi Bagi Agama Di Zaman Post-Sekular." *Diskurus- Jurnal Fislsafat Dan Teologi Driyarkara* 15, no. 1 (2016).

Towner, Philip. *The Goal of Our Instruction: The Structure of Theology and Ethic in the Patoral Epistles*. Bloosmsbury Academic, 2015.

Yewangoe, A. "Beberapa Catatan Mengenai Hubungan Gereja-Negara." *Hubungan Gereja Dan Negara Dan Hak Azasi Manusia*, 1996.